

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep pembangunan secara umum adalah usaha untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat dari kondisi tertinggal menjadi masyarakat yang lebih maju. Salah satu kebijakan pembangunan adalah peningkatan sarana air bersih yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Air merupakan sumber daya mineral yang sangat berharga dan menjadi kebutuhan pokok di setiap kegiatan serta kebutuhan berbagai sektor kehidupan. Air sebagai sumber daya alam, jumlah ketersediaannya terbatas maka perlu dikelola dengan baik agar yang membutuhkan air mampu mendapatkan akses yang sama. Untuk menjaga dan mengelola sumber daya air yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibentuklah dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air selain itu juga dibutuhkan suatu lembaga organisasi atau perangkat daerah yang dapat mengelola sumber daya air.

Salah satu lembaga organisasi perangkat daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 Pasal 1 “Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah”. Sehingga daerah dapat mendirikan BUMD. Pendirian BUMD bertujuan untuk: (1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya; (2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa

yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan (3) memperoleh laba dan/atau keuntungan. Pendirian BUMD juga didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Keuntungan atau laba yang diperoleh dari BUMD terkait dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 angka 18 tertulis: “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Warsito (2001:128), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Salah satu perusahaan daerah yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola sumber daya air di setiap daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan suatu entitas yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat. Didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 690-069 tahun 1992 tentang Pola Petunjuk Teknis Pengelolaan PDAM, menegaskan bahwa PDAM mempunyai tugas pokok pelayanan umum pada masyarakat. Dimana

dalam menjalankan fungsinya, PDAM diharapkan mampu membiayai dirinya sendiri dan harus berusaha mengembangkan tingkat pelayanannya. PDAM juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pembangunan kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Setiap akhir tahun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menyerahkan kontribusi laba bersihnya sebagai komponen pendapatan asli daerah Kabupaten Kupang kepada pemerintah daerah. Besarnya bagian laba yang diserahkan kepada pemerintah daerah tergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lontar Kabupaten Kupang adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kupang. Pendirian PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang adalah turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat serta ketenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan, kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang ditetapkan adalah untuk mengusahakan penyediaan air minum yang sehat serta mendistribusikannya kepada masyarakat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat.

Untuk mengetahui keberhasilan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam mencapai tujuan, dapat dilihat pada 3 (tiga) aspek sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum yang meliputi: aspek

keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Setiap aspek terdiri dari indikator-indikator. Untuk Aspek keuangan dapat diukur dengan angka-angka yang terdapat di laporan keuangan yang disusun secara periode yang berupa neraca, laporan laba/rugi, dan laporan arus kas (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009:1).

Tabel dibawah ini menyajikan data keuangan PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang tahun 2014-2018 :

Tabel 1.1
Total Aktiva Lancar, Hutang Lancar dan Laba Bersih Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lontar Kabupaten Kupang
Per 31 Desember 2014-2018

Tahun	Total Aktiva Lancar (Rp)	Total Hutang Lancar (Rp)	Total Laba Bersih (Rp)
2014	14.124.490.952	2.421.541.645	2.975.859.635
2015	19.148.486.184	3.170.187.339	2.694.331.903
2016	12.542.827.043	5.179.468.879	1.723.688.830
2017	18.677.907.760	5.815.884.973	3.790.449.974
2018	21.846.825.920	1.798.224.989	3.034.887.261

Sumber : Laporan Keuangan PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang

Berdasarkan uraian tabel 1.1 diatas diketahui bahwa perkembangan keuangan PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang selama 5 (lima) tahun terakhir yakni 2014 - 2018, dilihat dari aktiva lancar, hutang lancar dan laba bersih. Namun dalam pengukuran terhadap kinerja keuangan kita perlu mengetahui aspek lain dari kinerja selain aktiva lancar, hutang lancar dan laba bersih.

Dapat dilihat pada tabel 1.1 untuk persentase total aktiva lancar dari tahun 2014 ke tahun 2015 yakni 35,56% dengan total aktiva lancar meningkat sebesar Rp 5.023.995.232 sementara total aktiva dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 6.605.659.141 atau 34,49%. Untuk aktiva lancar pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan yakni 48,91% sebesar Rp 6.135.080.717 begitu pula aktiva lancar pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan yakni 16,96% atau sama dengan Rp 3.168.918.160.

Jumlah total hutang lancar pada tabel 1.1 diatas pada tahun 2014 ke tahun 2015 dengan persentase 30,91% atau meningkat sebesar Rp 748.645.694. Tahun 2016 dengan persentase 63,38% atau sebesar Rp 2.009.281.540 akan tetapi tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 636.416.094 atau 12,28%. Pada tahun 2018 total hutang lancar mengalami penurunan lagi menjadi Rp 4.017.659.984 dengan persentase penurunan sebesar 69,08%.

Sementara total laba bersih pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa laba bersih mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yakni sebesar Rp 281.527.732 atau 9,46% sampai dengan Rp 970.643.073 atau 36,02%. Pada tahun 2017 total laba bersih mengalami peningkatan sebesar Rp 2.066.761.144 atau 119,90%. Akan tetapi mengalami penurunan lagi pada tahun 2018 yakni sebesar Rp 755.562.713 dengan persentase penurunan sebesar 19,93%.

Aktiva lancar dan laba bersih sama-sama mengalami penurunan pada tahun 2016, sedangkan hutang lancar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penurunan aktiva lancar yang tidak sebanding dengan kenaikan hutang dapat

berdampak buruk pada kondisi keuangan perusahaan. Keadaan ini tidak sebanding antara penurunan aktiva lancar yakni piutang usaha dimana pada neraca dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan tahun 2015 piutang usaha memiliki pengaruh sebesar Rp 7.636.438.285 dan Rp 10.787.071.411, tahun 2016 sebesar Rp 6.946.061.705, pada tahun 2017 sebesar Rp 11.606.931.950, dan pada tahun 2018 sebesar Rp 14.087.788.202.

Dari fenomena tersebut diketahui bahwa kinerja sebuah BUMD yakni PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang selama lima tahun terakhir ditinjau pada aspek keuangan itu terukur dengan 10 (sepuluh) indikator yakni Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif, Rasio Laba terhadap Penjualan, Rasio Aktiva Lancar Terhadap Utang Lancar, Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas, Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang, Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi, Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo, Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air, Jangka Waktu Penagihan dan Efektivitas Penagihan. Indikator-indikator tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 Pasal 1-7 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum. Hal ini dilakukan setiap akhir tahun buku untuk mengetahui keberhasilan direksi dalam mengelola perusahaan daerah air minum. Bab 1 Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum. Penilaian kinerjanya tertuang dalam Bab II Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Bab III Pasal 6 dan Pasal 7 memuat ketentuan penutup.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik mengajukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lontar Kabupaten Kupang**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian adalah bagaimanakah kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lontar Kabupaten Kupang tahun 2014 - 2018 ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lontar Kabupaten Kupang tahun 2014 - 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang lain dan juga untuk mengembangkan dan menambah wawasan peneliti berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan saran pemikiran bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang dalam analisis kinerja keuangan untuk menentukan kebijakan agar perusahaan lebih maju.

b. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lainnya dan sebagai sumbangan pemikiran untuk diadakannya penelitian lebih lanjut.